

A network diagram on a black background featuring white dashed lines connecting several stylized human figures. Some figures are white, while others are grey. One figure is positioned inside a target symbol. The overall theme is interconnectedness and community.

HAERANA

NETWORK GOVERNANCE:

Strategi Kolaboratif dalam Pengentasan Kemiskinan Pedesaan



HAERANA

NETWORK GOVERNANCE:

Strategi Kolaboratif dalam Pengentasan Kemiskinan Pedesaan

NETWORK GOVERNANCE: STRATEGI KOLABORATIF DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PEDESAAN

Penulis:

Haerana

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Mursyid Fikri

ISBN:

978-634-246-438-0

Cetakan Pertama:

November, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku berjudul *Network Governance: Strategi Kolaboratif dalam Pengentasan Kemiskinan Pedesaan* dapat terselesaikan. Buku ini membahas relevansi *network governance* dalam pengentasan kemiskinan pedesaan dengan menyoroti perbandingan tata kelola konvensional dan kolaboratif, analisis kompleksitas kemiskinan, serta peran modal sosial. Uraian kemudian mengidentifikasi aktor-aktor kunci, strategi kolaboratif, dan kontribusi dinas terkait dalam memperkuat kapasitas desa. Selanjutnya ditawarkan desain model *network governance* yang aplikatif, dilengkapi analisis hambatan struktural, sosial, maupun teknologis serta strategi adaptif untuk mengatasinya. Pada akhirnya, buku ini merefleksikan masa depan pembangunan pedesaan yang lebih inklusif melalui digitalisasi, inovasi sosial, dan rekomendasi kebijakan praktis.

Sangat disadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Namun, diharapkan dapat memberi kontribusi nyata, baik sebagai referensi akademis maupun sebagai panduan praktis bagi para pengambil kebijakan, akademisi, maupun pelaku pembangunan di pedesaan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi dalam proses penyusunan buku ini.

Ucapan terimakasih teruntuk kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan buku ini dan akhirnya untuk perbaikan kualitas buku kedepannya maka sangat dinantikan saran dan kritik yang membangun.

September, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Kemiskinan Pedesaan di Indonesia	3
C. Mengapa Network Governance Relevan?	7
D. Tujuan dan Manfaat Buku	12
E. Metodologi dan Ruang Lingkup Pembahasan	15
BAB 2 TATA KELOLA KONVENSIONAL VS NETWORK GOVERNANCE	19
A. Evolusi Konsep Governance Dalam Pembangunan	19
B. Kelemahan Pendekatan Top-Down Dalam Pemberdayaan	24
C. Ciri dan Prinsip Dasar Network Governance	27
D. Struktur Desentralisasi dan Peran Aktor Non-Negara	31
E. Studi Perbandingan: Model di Berbagai Negara Berkembang	34
BAB 3 KEMISKINAN PEDESAAN DAN KOMPLEKSITAS STRUKTURAL	37
A. Definisi dan Dimensi Kemiskinan di Kawasan Pedesaan	37
B. Faktor Struktural dan Kultural Penyebab Kemiskinan	40
C. Ketimpangan Akses dan Kesenjangan Pembangunan	43
D. Pemberdayaan Sebagai Strategi Jangka Panjang	45
E. Peran Modal Sosial dan Kelembagaan Lokal	47
BAB 4 AKTOR DAN DINAMIKA JARINGAN	
DALAM TATA KELOLA PEDESAAN	51
A. Identifikasi Aktor Kunci:	
Pemerintah, LSM, Komunitas, dan Swasta	51
B. Relasi Kekuasaan dan Interdependensi Antar-Aktor	53
C. Mekanisme Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Jaringan	55
D. Peran Jembatan Sosial (Bridging Actors)	
Dalam Pengentasan Kemiskinan	57
E. Contoh Struktur Jaringan Yang Efektif di Tingkat Lokal	59

BAB 5 STRATEGI KOLABORATIF UNTUK

PENGENTASAN KEMISKINAN PEDESAAN 63

- A. Prinsip-Prinsip Kolaborasi Antar Aktor 63
- B. Integrasi Program Pemerintah dan Inisiatif Lokal 65
- C. Inovasi Dalam Jaringan Tata Kelola 70
- D. Kendala Implementasi Strategi Kolaboratif 72
- E. Indikator Keberhasilan Network Governance Dalam Pemberdayaan 74

BAB 6 PERAN DINAS SOSIAL DAN DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DMD) 79

- A. Mandat dan Fungsi Strategis Dinas Sosial 79
- B. Peran DPMD Dalam Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa 81
- C. Kolaborasi Dinas Dengan Lembaga Nonformal dan Komunitas 84
- D. Sinergi Program: PKH, Dana Desa, dan Program Inklusi Sosial 86
- E. Tantangan Koordinasi dan Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola 88

BAB 7 DESAIN MODEL NETWORK GOVERNANCE

UNTUK PEMBERDAYAAN PEDESAAN 91

- A. Kerangka Konseptual Model Tata Kelola Jaringan 91
- B. Pemetaan Aktor, Peran, dan Relasi Interaktif 93
- C. Simulasi Rantai Koordinasi dan Mekanisme Akuntabilitas 95
- D. Strategi Adaptasi Model Untuk Konteks Lokal Berbeda 97
- E. Visualisasi Model dan Panduan Implementasi Lapangan 99

BAB 8 HAMBATAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI 103

- A. Dinamika Kekuasaan dan Konflik Kepentingan103
- B. Ketergantungan Struktural Terhadap Aktor Kunci105
- C. Keterbatasan Kapasitas dan Akses Sumber Daya107
- D. Hambatan Sosial, Budaya, dan Adaptasi Teknologi109
- E. Strategi Adaptif dan Pendekatan Solusi Kontekstual111

BAB 9 MASA DEPAN NETWORK GOVERNANCE	
DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN	115
A. Transformasi Menuju Tata Kelola Kolaboratif Yang Inklusif	115
B. Digitalisasi dan Akselerasi Teknologi Dalam Tata Kelola Jaringan	117
C. Inovasi Sosial dan Dinamika Kepemimpinan Lokal	119
D. Rekomendasi Kebijakan dan Implikasi Praktis	121
E. Refleksi Teoritis dan Praktik Lapangan	123
DAFTAR PUSTAKA	127
GLOSARIUM	135
INDEKS	140
PROFIL PENULIS	144

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan pedesaan masih menjadi tantangan signifikan dalam pembangunan berkelanjutan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah diluncurkan, tingkat efektivitasnya seringkali terbatas oleh pendekatan yang terlalu terpusat dan tidak adaptif terhadap kompleksitas lokal (World Bank, 2020). Dalam konteks ini, pendekatan *network governance* atau tata kelola jaringan menjadi semakin relevan sebagai strategi alternatif yang lebih responsif dan kolaboratif.

Network governance merujuk pada mekanisme koordinasi antar aktor yang tersebar di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan, termasuk organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal. Pendekatan ini menekankan kolaborasi horizontal, alih-alih hierarki birokratis, dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan (Klijn & Koppenjan, 2016). Dalam konteks pengentasan kemiskinan pedesaan, *governance* berbasis jaringan memungkinkan sinergi antar aktor untuk menghasilkan solusi yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dalam tata kelola pembangunan, dari pendekatan *top-down* ke arah yang lebih inklusif dan partisipatif. Misalnya, Program Desa Mandiri dan Dana Desa membuka peluang bagi pemerintah desa dan komunitas lokal untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan (Bappenas, 2021). Namun,

BAB 2

TATA KELOLA KONVENSIONAL VS NETWORK GOVERNANCE

A. EVOLUSI KONSEP GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN

Perkembangan konsep *governance* dalam studi pembangunan merupakan hasil dari dinamika teori dan praktik pemerintahan yang terus berubah seiring waktu. *Governance*, yang secara umum merujuk pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya oleh berbagai aktor, mengalami pergeseran makna yang signifikan, terutama sejak era pasca-Perang Dingin. Dalam konteks pembangunan, istilah ini telah berevolusi dari pendekatan birokratis yang hierarkis menuju model yang lebih terbuka, inklusif, dan berbasis jaringan.

Pada masa awal pembangunan pascakolonial, negara diposisikan sebagai aktor utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *state-centric development* atau *developmentalisme*, yang menekankan peran negara sebagai perencana dan pelaksana tunggal kebijakan pembangunan (Leftwich, 2015). Dalam periode ini, konsep *governance* belum mendapat perhatian khusus karena fokus utama masih pada kapasitas institusi negara dan kontrol terhadap proses pembangunan.

Namun, mulai dekade 1980-an hingga awal 1990-an, krisis fiskal, kegagalan negara dalam menyediakan pelayanan publik, serta tekanan dari lembaga donor internasional memunculkan kritik terhadap efektivitas tata

BAB 3

KEMISKINAN PEDESAAN

DAN KOMPLEKSITAS STRUKTURAL

A. DEFINISI DAN DIMENSI KEMISKINAN DI KAWASAN PEDESAAN

Kemiskinan pedesaan perlu dipahami sebagai kondisi yang melampaui indikator pendapatan rendah. Pendekatan multidimensionalis sangat relevan karena mencerminkan realita kompleks yang dialami masyarakat di luar perkotaan. Dalam pengukuran industri terkini, termasuk Multidimensional Poverty Index (MPI) dari UNDP dan Alkire-Foster, kemiskinan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup (The Prakarsa, Journal of Universitas Airlangga+2The Prakarsa+2The Prakarsa+2 Di pedesaan Indonesia, IKM (Indeks Kemiskinan Multidimensi) menunjukkan bahwa hampir semua dimensi ini secara simultan menjadi kendala bagi banyak rumah tangga, terutama deprivasi terhadap air bersih, sanitasi layak, dan perumahan (The Prakarsa, 2023)

Berdasarkan pendekatan FAO untuk kawasan pedesaan, struktur IKM dikembangkan dengan memperluas tiga dimensi inti (kesehatan, pendidikan, standar hidup) menjadi lima dimensi spesifik pedesaan yaitu ketahanan pangan & gizi, penghidupan & sumber daya, serta risiko. Setiap dimensi tersebut menambahkan 18 indikator yang mencerminkan realitas kerentanan masyarakat desa terhadap krisis iklim, keterbatasan akses kredit, dan sumber daya pertanian yang terbatas (FAO, 2023)[Open Kn](#)

BAB 4

AKTOR DAN DINAMIKA JARINGAN DALAM TATA KELOLA PEDESAAN

A. IDENTIFIKASI AKTOR KUNCI: PEMERINTAH, LSM, KOMUNITAS, DAN SWASTA

Dalam pendekatan *network governance*, pengentasan kemiskinan pedesaan tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab tunggal pemerintah, melainkan sebagai hasil kolaborasi dari berbagai aktor dengan peran dan kapasitas yang saling melengkapi. Aktor-aktor kunci dalam jaringan tata kelola ini terdiri dari pemerintah (pusat dan daerah), LSM, komunitas lokal, dan sektor swasta. Masing-masing membawa agenda, sumber daya, serta mekanisme kerja yang dapat berkontribusi pada penciptaan solusi yang lebih adaptif dan berkelanjutan untuk konteks lokal.

Pemerintah tetap memegang peran penting sebagai pengarah kebijakan dan penyedia sumber daya. Fungsi regulatif dan distribusi fiskal yang dimiliki negara menjadikannya sebagai aktor pengikat dalam jaringan kolaboratif. Namun, peran ini tidak cukup jika tidak disertai dengan kemauan untuk membuka ruang partisipasi dan mendukung inisiatif lokal. Dalam banyak kasus, kapasitas pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif menjadi penentu keberhasilan implementasi strategi pengentasan kemiskinan (Koppenjan & Klijn, 2016).

BAB 5

STRATEGI KOLABORATIF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN PEDESAAN

A. PRINSIP-PRINSIP KOLABORASI ANTAR AKTOR

Kolaborasi antar aktor merupakan fondasi utama dalam pendekatan *network governance*, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan pedesaan yang kompleks dan multidimensi. Keberhasilan kolaborasi ini sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip dasar yang membentuk hubungan saling percaya, transparansi, kesetaraan, dan tanggung jawab kolektif di antara para pihak yang terlibat. Dalam kerangka *network governance*, kolaborasi bukan hanya soal kerja sama teknis, tetapi tentang pembangunan sistem interdependensi yang produktif dan berkelanjutan (Ansell & Gash, 2008).

Salah satu prinsip paling krusial dalam kolaborasi adalah kepercayaan (*trust*). Tanpa kepercayaan, kolaborasi hanya menjadi relasi formal yang rentan terhadap konflik dan fragmentasi. Trust dibangun melalui sejarah interaksi yang konsisten, keterbukaan informasi, dan keberhasilan kecil yang dapat dirayakan bersama. Dalam konteks pedesaan, di mana masyarakat memiliki struktur sosial yang lebih erat, kepercayaan memainkan peran ganda sebagai pengikat sosial dan penjamin keberlangsungan program (Emerson & Nabatchi, 2015).

BAB 6

PERAN DINAS SOSIAL DAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DMD)

A. MANDAT DAN FUNGSI STRATEGIS DINAS SOSIAL

Dinas Sosial merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran sentral dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya pengentasan kemiskinan pedesaan. Mandat institusional Dinas Sosial didasarkan pada regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta peraturan pelaksanaannya di tingkat daerah. Dalam konteks *governance* kolaboratif, Dinas Sosial menjadi simpul penting yang menjembatani antara kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat lokal melalui program-program sosial yang terintegrasi.

Fungsi strategis Dinas Sosial meliputi penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial, jaminan dan perlindungan sosial, penanganan fakir miskin, pemberdayaan komunitas rentan, hingga fasilitasi program pemberdayaan sosial berbasis keluarga dan masyarakat. Dalam konteks pedesaan, fungsi-fungsi ini sangat relevan karena karakteristik kemiskinan cenderung multidimensi dan memerlukan pendekatan yang holistik (Sumarto & Bazzi, 2014). Dinas Sosial memiliki mandat untuk memastikan keberlanjutan

BAB 7

DESAIN MODEL NETWORK GOVERNANCE

UNTUK PEMBERDAYAAN PEDESAAN

A. KERANGKA KONSEPTUAL MODEL TATA KELOLA JARINGAN

Model tata kelola jaringan (*network governance*) dalam konteks pemberdayaan pedesaan merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Kerangka konseptual ini dibangun atas dasar bahwa kompleksitas masalah kemiskinan di pedesaan tidak dapat dipecahkan secara linier oleh satu aktor atau institusi, tetapi membutuhkan interaksi yang bersifat horizontal, fleksibel, dan adaptif antara pemerintah, komunitas, sektor swasta, dan lembaga nonpemerintah (Ansell & Gash, 2008).

Secara umum, kerangka konseptual *network governance* terdiri dari tiga pilar utama, yaitu aktor, mekanisme koordinasi, dan tujuan kolektif. Pilar pertama, aktor, mencakup semua pihak yang memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan. Di pedesaan Indonesia, aktor ini meliputi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Sosial, kepala desa, BUMDes, LSM lokal, tokoh masyarakat, serta kelompok swadaya masyarakat. Relasi di antara aktor-aktor ini bersifat interdependen dan menuntut keterbukaan informasi, kepercayaan, serta distribusi tanggung jawab yang merata (Emerson & Nabatchi, 2015).

BAB 8

HAMBATAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

A. DINAMIKA KEKUASAAN DAN KONFLIK KEPENTINGAN

Dalam implementasi strategi *network governance* untuk pengentasan kemiskinan pedesaan, dinamika kekuasaan dan konflik kepentingan menjadi salah satu tantangan paling krusial yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Dalam jaringan tata kelola yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal, relasi kekuasaan yang timpang dapat menimbulkan dominasi oleh aktor-aktor tertentu dan meminggirkan aktor lainnya, terutama kelompok masyarakat miskin yang menjadi sasaran program.

Kekuasaan dalam jaringan *governance* tidak hanya bersifat formal atau struktural, tetapi juga dapat bersumber dari pengetahuan, akses informasi, kontrol terhadap sumber daya, dan kedekatan dengan pengambil kebijakan (Agranoff, 2018). Dalam konteks pedesaan Indonesia, termasuk di Kabupaten Gowa, terdapat kecenderungan bahwa aktor-aktor dari lembaga pemerintah daerah lebih memiliki kontrol terhadap agenda program dan alokasi sumber daya dibandingkan komunitas lokal. Ketidakseimbangan ini menciptakan kesenjangan representasi dalam proses pengambilan keputusan, yang berujung pada lemahnya rasa kepemilikan dan rendahnya partisipasi masyarakat.

BAB 9

MASA DEPAN NETWORK GOVERNANCE

DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN

A. TRANSFORMASI MENUJU TATA KELOLA KOLABORATIF YANG INKLUSIF

Transformasi tata kelola pembangunan pedesaan menuju model yang kolaboratif dan inklusif mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan yang bersifat hierarkis dan birokratis ke arah pendekatan jaringan (*network governance*). Dalam konteks ini, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi elemen sentral dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Model tata kelola jaringan tidak hanya menekankan keterlibatan pemerintah, tetapi juga menempatkan masyarakat, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga informal sebagai aktor penting dalam pengambilan keputusan. Transformasi ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas masalah pedesaan yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak oleh pemerintah.

Perubahan menuju tata kelola kolaboratif ditandai oleh meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya inklusivitas dalam proses pembangunan. Inklusivitas di sini tidak hanya berarti keterlibatan masyarakat secara umum, tetapi juga menjamin partisipasi kelompok rentan, seperti perempuan, pemuda, dan kelompok minoritas lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan sosial. Menurut Ansell dan Gash (2008), *collaborative*

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R. (2018). *Local governments in multilevel systems: Emergent public administration challenges*. Rowman & Littlefield.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18*(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28*(1), 16–32.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Ansell, C., & Miura, S. (2020). Can the power of platforms be harnessed for governance? *Public Administration*, 98*(1), 200–213.
<https://doi.org/10.1111/padm.12650>
- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public governance as co-creation: A strategy for revitalizing the public sector and reinvigorating democracy*. Cambridge University Press.
- Bodin, Ö., Robins, G., McAllister, R. R. J., Guerrero, A. M., Crona, B., Tengö, M., ... & Lubell, M. (2019). Theorizing benefits and constraints in collaborative environmental governance: A transdisciplinary social network approach for empirical investigations. *Ecology and Society*, 24*(1).
<https://doi.org/10.5751/ES-10556-240101>

- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2014). Public accountability. In M. Bovens, R. E. Goodin, & T. Schillemans (Eds.), **The Oxford handbook of public accountability** (pp. 1–20). Oxford University Press.
- Branden, T., Cattacin, S., Evers, A., & Zimmer, A. (Eds.). (2016). **Social innovations in the urban context**. Springer.
- Budiman, A. (2020). Village digitalization and its challenges in rural governance. **Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24*(1), 1–12. <https://doi.org/10.22146/jsp.49170>
- Crosby, B. C., & Bryson, J. M. (2018). Why leadership of public leadership research matters: And what to do about it. **Public Management Review*, 20*(9), 1265–1286. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1348731>
- Dewi, N. K., & Pratiwi, A. D. (2022). Peran dasa wisma dalam pemberdayaan keluarga miskin. **Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26*(3), 311–322.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). **Collaborative governance regimes**. Georgetown University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. **Journal of Public Administration Research and Theory*, 22*(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fischer, M. (2015). Collaboration patterns, external shocks and performance in horizontal government networks: A dynamic analysis. **Public Administration*, 93*(4), 1016–1034.

- <https://doi.org/10.1111/padm.12180>
- Giest, S., & Mukherjee, I. (2018). Designing and implementing open data projects. **Government Information Quarterly*, 35*(2), 233–242.
- Hakim, L., Supriatna, N., & Hadi, S. (2017). Capacity development and institutional strengthening for rural community empowerment in Indonesia. **Asian Social Work and Policy Review*, 11*(2), 122–132. <https://doi.org/10.1111/aswp.12114>
- Head, B. W., & Alford, J. (2015). Wicked problems: Implications for public policy and management. **Administration & Society*, 47*(6), 711–739.
- Isett, K. R., Mergel, I. A., LeRoux, K., Mischen, P. A., & Rethemeyer, R. K. (2011). Networks in public administration scholarship: Understanding where we are and where we need to go. **Journal of Public Administration Research and Theory*, 21*(suppl_1), i157–i173. <https://doi.org/10.1093/jopart/muq061>
- Janssen, M., Charalabidis, Y., & Zuiderwijk, A. (2018). Benefits, adoption barriers and myths of open data and open government. **Information Systems Management*, 35*(2), 122–136. <https://doi.org/10.1080/10580530.2018.1449106>
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). **Governance networks in the public sector**. Routledge.
- Lindgren, I., Madsen, C. Ø., Hofmann, S., & Melin, U. (2019). Close encounters of the digital kind: A research agenda for the digitalization of public services. **Government Information Quarterly*, 36*(3), 427–436.

- <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.02.004>
- Peixoto, T., & Fox, J. (2021). When does ICT-enabled citizen voice lead to government responsiveness? *Information Technology for Development, 27*(2), 248–270. <https://doi.org/10.1080/02681102.2020.1721832>
- Pratama, H. A. (2021). Fragmentasi kebijakan dan integrasi data dalam program penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Administrasi Publik, 12*(1), 33–45.
- Purwanto, E. A. (2020). Network governance and community empowerment in Indonesia: Lessons from participatory village development. *Journal of Public Administration and Governance, 10*(1), 153–168. <https://doi.org/10.5296/jpag.v10i1.16621>
- Purwanto, E. A., Pramusinto, A., & Widianingsih, I. (2022). Understanding collaborative governance in Indonesian local government: Patterns, challenges, and innovations. *Policy Studies, 43*(1), 89–108. <https://doi.org/10.1080/01442872.2020.1807884>
- Rahmawati, N., & Syamsul, H. (2020). Kolaborasi antar aktor dalam pelaksanaan program desa mandiri. *Jurnal Bina Praja, 12*(2), 145–157.
- Rhodes, R. A. W. (2007). Understanding governance: Ten years on. *Organization Studies, 28*(8), 1243–1264. <https://doi.org/10.1177/0170840607076586>

- Rohman, M., & Sulaiman, M. (2019). Strategi pemberdayaan masyarakat berbasis jaringan lokal. **Jurnal Pemberdayaan*, 4*(1), 45–58.
- Scott, M., & DeLone, W. (2018). Understanding digital government success: A review and synthesis of the literature. **Government Information Quarterly*, 35*(2), 208–220. https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.01.005[<https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.01.005>]
- Scott, T. A., & Thomas, C. W. (2017). Unpacking the collaborative toolbox: Why and when do public managers choose collaborative governance strategies? **Policy Studies Journal*, 45*(1), 191–214. https://doi.org/10.1111/psj.12152[<https://doi.org/10.1111/psj.12152>]
- Setiawan, E., Nugroho, H., & Damayanti, T. (2020). Village governance and institutional capacity in managing rural development programs in Indonesia. **Journal of Rural Studies*, 78*, 131–140. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.06.001[<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.06.001>]
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2017). Metagoverning collaborative innovation in governance networks. **The American Review of Public Administration*, 47*(7), 826–839. https://doi.org/10.1177/0275074016643181[<https://doi.org/10.1177/0275074016643181>]
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2018). The democratizing impact of governance networks: From pluralization, via democratic anchorage, to interactive political leadership. **Public Administration*, 96*(2), 302–317.
- Sotarauta, M., & Beer, A. (2017). Governance, agency and place leadership: Lessons from a cross-national analysis. **Regional Studies*, 51*(2), 210–223.

- <https://doi.org/10.1080/00343404.2015.1119265>
- Sutrisno, R., & Hamid, S. (2022). Kolaborasi multisektor dalam tata kelola dana desa: Studi pada pemerintah daerah di Indonesia Timur. **Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 10*(2), 87–98.
- Torfig, J., Peters, B. G., Pierre, J., & Sørensen, E. (2012). **Interactive governance: Advancing the paradigm**. Oxford University Press.
- Torfig, J., Sørensen, E., & Røiseland, A. (2020). Transforming the public sector into an arena for co-creation: Barriers, drivers, benefits, and ways forward. **Administration & Society*, 52*(2), 195–222.
- UNDP Indonesia. (2021). **Rural area digital transformation: Policy framework and implementation strategies**. Jakarta: United Nations Development Programme.
- Wicaksono, D., & Hidayat, M. F. (2020). Sinergi kelembagaan dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial. **Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24*(1), 120–135.
- Widianingsih, I., & Morrell, E. (2022). Participatory governance and cultural barriers in rural Indonesia: A case for inclusive deliberation. **Asian Journal of Comparative Politics*, 7*(1), 74–87. <https://doi.org/10.1177/20578911211057383>
- Wijaya, R., & Saripudin, A. (2023). Penguatan kapasitas kelembagaan dalam governance kolaboratif. **Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11*(1), 65–78.
- Wijayanti, D. R., Hadi, S. P., & Kholid, M. (2019). Enhancing local government capacity through participatory development planning: A case study from Central Java. **Public Policy and Administration*, 18*(4), 77–87.

<https://doi.org/10.13165/VPA-19-18-4-06>

Yusuf, M., Amalia, F., & Hasanuddin, H. (2020). Inovasi desa dalam pengembangan ekonomi lokal: Studi kasus desa wisata di Sulawesi Selatan. **Jurnal Pengembangan Daerah, 5*(2)*, 87–96.

Yusuf, M., & Hasanuddin, H. (2021). Inovasi kolaboratif dalam pengembangan desa digital di Sulawesi Selatan. **Jurnal Pengembangan Daerah, 6*(2)*, 98–110.

Ziegler, R. (2017). Social innovation as a collaborative concept. **Innovation: The European Journal of Social Science Research, 30*(4)*, 388–405. <https://doi.org/10.1080/13511610.2017.1348935>

PROFIL PENULIS



Haerana. Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Tamat S1 di Jurusan Administrasi Negara pada FISIPOL Universitas Hasanuddin; tamat pada program Akta IV di Universitas Negeri Makassar; tamat S2 pada Jurusan Administrasi Pendidikan di

Universitas Negeri Makassar; tamat S3 pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar. Saat menjalani masa studi Program Doktorat di Universitas Negeri Makassar berhasil mendapatkan Beasiswa pada Program Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI) Tahun 2019 dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan negara tujuan Amerika Serikat (Northern Illinois University). Penulis telah berhasil terbitkan sebuah buku berjudul Manajemen Pembelajaran Berbasis Standar Proses Pendidikan (2016). Buku referensi yang berjudul Dinamika Administrasi Publik (2021). Bookchapter : Ilmu Negara (2021). Bookchapter : Manajemen Sumber Daya Manusia (2022). Buku referensi dengan judul Manajemen Pelayanan Publik (2022). Buku Referensi : Pemberdayaan Masyarakat (2023). Bookchapter : Pengantar Administrasi Negara (2024). Bookchapter : Kajian Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (2024).

NETWORK GOVERNANCE:

Strategi Kolaboratif dalam Pengentasan Kemiskinan Pedesaan

Network Governance: Strategi Kolaboratif dalam Pengentasan Kemiskinan Pedesaan menyajikan pendekatan inovatif dalam tata kelola pembangunan pedesaan berbasis kolaborasi antarlembaga. Buku ini mengeksplorasi bagaimana relasi antar-aktor seperti pemerintah, komunitas lokal, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sektor swasta membentuk jaringan strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dengan menggabungkan teori tata kelola jaringan, studi lapangan di Kabupaten Gowa, dan praktik baik di berbagai wilayah Indonesia, buku ini menghadirkan panduan konseptual sekaligus praktis bagi akademisi, pembuat kebijakan, pelaku pembangunan desa serta berbagai pihak pemerhati dalam pengentasan kemiskinan.

Disusun secara sistematis dengan referensi ilmiah terkini, buku ini mendorong pembaca memahami tantangan struktural, hambatan sosial budaya, hingga pentingnya inovasi kelembagaan di tingkat lokal. Visualisasi model dan mekanisme koordinasi disediakan untuk membantu implementasi langsung di lapangan. Akhirnya, buku ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan pedesaan tidak bisa lagi ditangani secara sektoral atau parsial. Melalui network governance, diharapkan lahir strategi kolaboratif yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu menjawab kompleksitas persoalan kemiskinan di Indonesia.



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pelanggan & Promosi Buku
0815-7000-899

Ekonomi & Perbankan

ISBN 978-634-246-438-0



9

786342

464380